

**ANALISIS PENGARUH KINERJA DAN KARAKTERISTIK PEMDA TERHADAP
TINGKAT PENGUNGKAPAN DAN KUALITAS INFORMASI
DALAM WEBSITE PEMDA**

RORA PUSPITA

Mahasiswa Program Studi S1 Universitas Indonesia

DWI MARTANI

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Abstract

This research analyzes several factors of municipal voluntary internet-based disclosure on municipals website. Municipal website measurement is divided into two types, content of website and performance of website. The research combine financial disclosures perspective and quality of website perspective. Disclosure of municipals information in internet will increase transparency and accountability of municipal. Peoples in these municipals, financial, This research extend Laswad et.al. (2005) by adding the measurement of disclosures.

In addition, e-government and digital public reporting theories are added in this research as a preliminary theory for voluntary internet-based disclosure. Factor impacting the presentation of voluntary internet-based disclosure are: municipal dependability, size, municipal complexity, and municipal expenditure. factors impacting the total voluntary internet-based disclosure are: municipal dependability and size. The implication of this finding can be a contribution for government to make a standardize item that needs to be disclosed in municipal website.

Key words: Governmental accounting; e-government; digital public reporting; voluntary internet disclosure.

1. Pendahuluan

Reformasi Keuangan dan Otonomi Daerah telah merubah iklim pelaksanaan pemerintahan daerah. Akuntabilitas dan transparansi mulai diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan. Pemda menyusun laporan keuangan, BPK mengaudit dan menyampaikan kepada

DPRD. Pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintah daerah sebenarnya tidak hanya diberikan kepada DPRD sebagai wakil rakyat tetapi juga masyarakat secara luas. Informasi anggaran dan akuntabilitas pelaksanaan Pemda seharusnya disampaikan kepada publik melalui media sehingga rakyat dapat mengaksesnya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi perkembangan perekonomian yang ditandai dengan proses digitalisasi pertukaran informasi melalui berbagai media komunikasi yang memanfaatkan teknologi informasi. Proses digitalisasi terjadi di semua organisasi disebabkan oleh biaya yang relatif lebih murah ketika menggunakan teknologi dalam menyampaikan suatu informasi serta kekuatan dari teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan dan memudahkan tingkat aktivitas entitas ekonomi, yang sebelumnya dilakukan dengan manual dan konvensional (Bonson & Escobar, 2005). Teknologi komunikasi dan informasi mengacu kepada penggunaan teknologi seperti: internet, intranet, ekstranet, *e-government*, ERP, dan bentuk teknologi lainnya yang menghadirkan kemajuan bagi entitas ekonomi. Lebih dari 19% dari seluruh organisasi Pemerintah di seluruh dunia telah mengadopsi *e-government* dengan tingkatan yang berbeda (West, 2005).

Website pemerintah daerah dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pemerintah daerah kepada publik. Riset di beberapa negara menunjukkan, salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dilakukan dengan mempublikasikan laporan keuangan di internet (Laswad et.al, 2005). Hampir semua Pemda di Indonesia memiliki website, dengan kualitas website dan peranan yang berbeda. Ada yang sekedar memberikan informasi umum tentang daerah tersebut, namun ada juga yang telah memanfaatkan untuk kegiatan pelayanan masyarakat, sosialisasi peraturan dan sarana berkomunikasi secara interaktif dengan warganya.

Beberapa peraturan di Indonesia telah menyebutkan secara implisit mengenai memanfaatkan media elektronik untuk mengungkapkan informasi kepada masyarakat. Peraturan tersebut diantaranya adalah PP No. 6 Tahun 2008, PP No. 3 Tahun 2007, dan Permendagri No. 7A Tahun 2007. Media elektronik pada ketiga peraturan yang dimaksud dapat merujuk kepada *website* milik Pemda yang dapat dimanfaatkan Pemda untuk mengungkapkan informasi kepada masyarakat. Informasi yang harus diungkapkan Pemda melalui media elektronik adalah: informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (PP No. 3 Tahun 2007 dan Permendagri No. 7A Tahun 2007) dan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (PP No. 6 Tahun 2008). Merujuk pada tiga peraturan tersebut, pengungkapan informasi selain informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digolongkan sebagai pengungkapan yang bersifat sukarela.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Pemda yang memiliki *website* resmi telah mengungkapkan informasi keuangan, pelayanan dan informasi lainnya dalam *website* Pemda, sehingga informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengakses *website* tersebut. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi kinerja, tingkat dependensi dan karakteristik Pemda (ukuran, kompleksitas dan belanja daerah) berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi di *website* Pemda. Pembahasan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu: pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan.

2. Review Literatur dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Review Literatur

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agent, sehingga agent tidak selamanya mengikuti keinginan prinsipal. Hubungan

keagenan tersebut juga terjadi di Pemerintahan antara rakyat sebagai agen dan pemerintah sebagai prinsipal. Pemerintah dapat melakukan kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa dan mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mengurangi konflik maka diperlukan monitoring oleh prinsipal atas apa yang dilakukan oleh agen. Laporan keuangan dan pengungkapan informasi kepada publik adalah salah satu bentuk alat monitoring untuk mengurangi *agency cost*. Dalam konsepsi pemberian informasi melalui internet kepada publik dapat dijadikan alat untuk mengurangi konflik keagenan.

Teori *signalling* menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanah dari rakyat berkeinginan menunjukkan signal kepada masyarakat. Pemerintah akan memberikan signal ke masyarakat dengan cara memberikan laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem internal kontrol, pengungkapan yang lebih lengkap, penjelasan lebih detail dalam website. Pemda dapat juga mengemas informasi prestasi dan kinerja keuangan dengan lebih lengkap untuk menunjukkan bahwa Pemda telah menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat. Pengungkapan atau *disclosure* dalam literatur akuntansi dibedakan menjadi dua yaitu pengungkapan yang bersifat wajib dan sukarela. Fokus dalam penelitian pengungkapan di sektor privat seringkali pada pengungkapan sukarela, karena pengungkapan tersebut mencerminkan inisiatif untuk lebih transparan dalam pengelolaan organisasinya.

Aparatur Pemda dapat terikat dengan beberapa *interest groups*, dimana *interest groups* ini memiliki *bargaining power* untuk mempengaruhi hasil pilkada pada periode berikutnya (Baber, 1983). Informasi Pemda juga dapat menarik investor untuk melakukan investasi, pihak donor untuk memberikan hibah dan wisatawan untuk berkunjung yang pada akhirnya akan menaikkan pendapatan dan meningkatkan kinerja Pemda. Keterikatan antara aparatur Pemda dengan *interest group* menyediakan insentif bagi Pemda untuk mengungkapkan informasi secara sukarela yang membuat aksi-aksi *monitoring* dapat dilakukan.

E-government adalah bentuk aplikasi dari teknologi informasi, terutama teknologi internet untuk memperkaya akses, penyampaian informasi dan pelayanan Pemerintah untuk masyarakat, unit bisnis, pegawai, dan *stakeholder* lainnya. Implementasi *e-government* terus mengalami peningkatan, terdapat 19% dari seluruh organisasi Pemerintah di seluruh dunia telah mengadopsi *e-government* (West, 2005).

Mengutip dari Gupta et. al. (2008), berdasarkan interaksi yang dilakukan Pemerintah dengan *stakeholdersnya*, *e-government* diklasifikasikan sebagai interaksi antara Pemerintah dengan: (1) Klien internal dan penduduknya “*Government to Citizen (G2C)*”; (2) Unit bisnis terkait “*Government to Business (G2B)*”; (3) Pegawai internal Pemerintah “*Government to Employee (G2E)*”; (4) Institusi Pemerintah lainnya “*Government to Government (G2G)*”; (5) hubungan antara penduduk dengan penduduk, “*Citizen to Citizen (C2C)*”.

Reddick (2004) menggambarkan pertumbuhan *e-government* ke dalam dua tahapan (*catalouging* dan *transaction*) dengan menggunakan tiga hubungan utama yang dilakukan Pemerintah, yaitu: G2C, G2G, dan G2B. Dua tahapan berikutnya, yaitu *vertical integration* dan *horizontal integration* tidak dibahas cakupannya pada teori ini. Tahap ini dapat dilihat pada Tabel 2.1. Pada tahap *catalouging*, Pemda dapat *display* informasi pada *website* miliknya. *Display* informasi dapat dikatakan sebagai pengungkapan informasi oleh Pemda pada *website* Pemda. Implementasi *e-government* dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi Pemerintah, yaitu: (1) Meningkatkan efisiensi, meningkatkan akses terhadap servis, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan *citizen empowerment*. (2) Menurunkan biaya dan waktu untuk melakukan pelayanan. (3) Memberikan keuntungan strategik seperti meningkatkan proses pengambilan keputusan melalui arus informasi; meningkatkan *sharing knowledge* dan *organizational learning*; meningkatkan interaksi dengan penduduk, institusi pemerintahan lainnya, bisnis, dan industri; meningkatkan kekuatan masyarakat untuk memaksa Pemerintah

memiliki hubungan yang lebih baik dengan sektor swasta; meningkatkan kemampuan untuk memberikan efek terhadap *organizational change management* (Gupta et. al., 2008).

Beattie & Pratt (2001) menyatakan internet diklaim telah memberikan proses revolusi yang potensial terhadap pelaporan karena internet memiliki skala penggunaan yang global, kapasitas yang interaktif, dan kecepatan yang baik. Perkembangan ini juga terjadi di entitas Pemda. *Computer-based tools* dapat memfasilitasi akses informasi Pemda, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan akses terhadap informasi penting yang diungkapkan, yang sebelumnya hanya bisa diakses melalui dokumen *hardcopy*. Pada Tabel 2.2 mengenai perbandingan pelaporan tradisional dan *on-line*, dapat dilihat bahwa perubahan pengungkapan informasi dari *hard copy* menjadi media *on-line* telah mengubah banyak hal pada entitas pemerintah (Perez et.al, 2005)

Pengukuran tingkat pengungkapan sukarela di internet dilakukan dengan membagi pengungkapan ke dalam pengungkapan konten dan presentasi pengungkapan dari *website*. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya adalah: Xiao et.al. (2004); Debrecny, Gray, & Rahman (2002); Marston dan Polei (2004); Perez, Hernandez, & Bolivar (2005); Cormier, Ledoux, & Magnan (2008).

Konten *website* berisi mengenai informasi apa saja yang dapat diungkapkan entitas pelaporan pada *website* yang digunakannya. Perez et. al. (2005) mencoba merumuskan konten dari informasi yang dimasukkan ke dalam *website*. Terdapat tiga tipe konten informasi yang dapat disediakan Pemerintah di *websitenya*, yaitu: (1) Informasi anggaran dan arus kas. (2) Informasi keuangan. (3) Indikasi manajemen dan pelayanan yang diberikan. Presentasi *website* merepresentasikan desain, navigasi, fitur, dan *tools* yang ada pada *website* milik entitas ekonomi pada *website* miliknya sehingga *website* menjadi lebih menarik atau lebih mudah diakses oleh *users*. Perez, Hernandez, & Bolivar (2005) mendefinisikan desain dan navigasi dari *website* mencakup enam hal penting yang memberikan dampak terhadap akses dari

website Pemerintah, yaitu: (1) Informasi yang mudah untuk dikenali. (2) *Personalization* dari informasi yang disajikan kepada *users*. (3) Kemudahan transfer informasi. (4) Kemudahan manajemen informasi yang disediakan. (5) Penggunaan bahasa yang berbeda untuk mengungkapkan informasi. (6) Kemudahan interaksi dengan *users*.

Laswad et.al. (2005) meneliti *internet financial reporting* Pemda New Zealand. Penelitian berfokus kepada faktor-faktor yang dianggap paling relevan mempengaruhi hasil dari *internet financial reporting* Pemda New Zealand. Faktor yang diduga mempengaruhi tingkat pengungkapan adalah: (1) Kompetisi politik. (2) *Size*, (3) *Leverage*, (4) Kekayaan Pemda, (5) *Press visibility*. (6) Tipe Pemda. Hasil penelitian Laswad et.al. (2005) menunjukkan bahwa *size* dan tingkat kompetisi politik bukan merupakan faktor yang memiliki asosiasi dengan tingkat *internet financial reporting*. Pemda yang memiliki tingkat *leverage* dan tingkat kekayaan yang lebih tinggi memiliki tingkat *internet financial reporting* yang lebih tinggi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan *univariate analysis*, dan *multivariate analysis*.

Robbin dan Austin (1987) meneliti yang mempengaruhi kualitas pengungkapan pada laporan keuangan tahunan Pemda di Amerika dengan menggunakan *compound measure* dan *unidimensional (simple) measures*. Variabel independen yang digunakan mengikuti penelitian dari Ingram (1984), namun penelitian Ingram (1984) dilakukan pada tingkat *state government* di Amerika, sedangkan penelitian Robbin dan Austin (1987) dilaksanakan pada tingkat *local government* di Amerika. Perincian variabel dapat dilihat pada Tabel 2.3. Hasil dari penelitian Robbin dan Austin (1987) adalah: (1) Untuk pengungkapan kota, *administrative power* dan *management incentive* berhubungan dengan kualitas pengungkapan baik itu menggunakan *simple index* atau *compound index*. (2) Pada model regresi, bentuk pemerintahan, ketergantungan terhadap hutang dan ketergantungan dana federal adalah variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan baik itu menggunakan *simple index* maupun *compound index*.

Liestiani (2008) meneliti pengungkapan laporan keuangan Pemda kabupaten/kota di Indonesia untuk tahun anggaran 2006. Hasil penelitian Liestiani (2008) menyimpulkan bahwa: (1) tingkat kekayaan daerah dan kompleksitas daerah mempunyai hubungan positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD (2) tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat dan jenis Pemda tidak berhubungan secara signifikan (3) banyaknya temuan pemeriksaan memiliki hubungan positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD (4) tingkat penyimpangan yang didapat dari total temuan pemeriksaan dalam rupiah dibagi dengan total nilai rupiah APBD yang diperiksa mempunyai hubungan negatif dengan tingkat pengungkapan LKPD.

2.1. Pengembangan Hipotesis

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD menunjukkan kinerja daerah untuk menghasilkan pendapatannya secara mandiri. Pemda yang memiliki PAD tinggi akan menunjukkan kepada para *stakeholdersnya* bahwa Pemda telah menghasilkan kinerja yang tinggi. Kinerja yang tinggi merupakan sinyal dari manajemen publik yang baik (Christiaenssens, 1999). Pemda yang memiliki performa yang buruk akan menghindari pengungkapan sukarela (seperti dalam bentuk *voluntary internet-based disclosure*) dan akan lebih memilih untuk membatasi akses informasi untuk masyarakat (Craven & Marston, 1999). Pemda yang berkinerja baik akan mengungkapkan informasi lebih banyak dan menggunakan teknik pengungkapan yang lebih baik sesuai dengan teori *signaling*.

H_1 : *Rasio PAD berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan dalam website.*

Tingkat Ketergantungan

Robbin dan Austin (1987) memaparkan bahwa *intergovernmental revenue* merepresentasikan tingkat ketergantungan Pemda. Tingkat ketergantungan yang tinggi cenderung meningkatkan tingkat pengungkapan. Pemerintah Pusat memantau apa yang dilakukan Pemda dan tingkat pencapaian kinerja atas alokasi dana umum dan dana khusus dari Pemerintah

Pusat.Liestiani (2008) menggunakan tingkat ketergantungan Pemdasebagai faktor yang diteliti mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela Pemda di Indonesia.Semakin tinggi DAU yang diterima Pemda, menunjukkan tingkat ketergantungan yang besar terhadap sumber dana lain untuk membiayai aparaturnya. Pemda yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sumber dana Pemerintah Pusatsehingga Pemda memiliki tekanan untuk mengungkapkan informasi lebih banyak.

H₂: Rasio tingkat ketergantunganberpengaruhpositif terhadap tingkat pengungkapan dalam website.

Ukuran Pemda

Laswad et.al. (2005) menghubungkan kinerja terhadap *internet financial reporting* dengan ukuran Pemda. Ukuran Pemda digambarkan dengan seberapa besar aset yang dimiliki oleh Pemda. Besarnya aset yang dimiliki Pemda akan menggambarkan seberapa besar ukuran Pemda tersebut. Internet merupakan media yang efisien dalam mengungkapkan informasi bagi Pemda karena biaya untuk mengungkapkan informasi pada internet tidak akan terpengaruh oleh besarnya aset yang dimiliki oleh Pemda (Ettredgeet.al., 2002). Hal ini berimplikasi pada keuntungan pengungkapan dengan menggunakan media internet yang akan meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran Pemda (Debrencyet.al.,2002).

H₃ : Ukuran Pemda berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan dalam website.

Kompleksitas Pemerintahan

Mengutip dari Liestiani, 2008 yang dikutip dari Pasal 28 ayat 2 UU No. 33 Tahun 2004, besarnya penduduk mencerminkan besarnya kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap daerah. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin besar tuntutan akan pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintahnya mengingat fungsi Pemerintah sebagai abdi masyarakat. Ingram (1984) memaparkan bahwa variabel kompleksitas pemerintahan (yang diproksi dengan jumlah

penduduk)memberikan dorongan kepada Pemda untuk meningkatkan pengungkapan pada laporan keuangannya.

H₄ : Kompleksitas pemerintahan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan dalam website.

2.6.5 Belanja Daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 167 ayat 1, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Semakin tinggi belanja, Pemda seharusnya memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakatnya. Merujuk kepada hal ini, seharusnya semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan, semakin tinggi keinginan Pemda untuk mengungkapkan informasi pelayanan pada *website* Pemda.

H₅ :Belanja daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan dalam website Pemda.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan data 108 Pemda yang diobservasi pengungkapan *websitenya* pada periode Bulan Februari-Maret 2010. Dari total 225 Pemda yang mendapatkan opiniWTP dan WDP dari BPK, penelitian mengeluarkan 25 Pemda yang tidak memiliki *website* resmi. Dari 200 Pemda yang memiliki *website* resmi, penelitian mengeluarkan 32 Pemda yang *website* resminya tidak dapat diakses pada saat perhitungan indeks sukarela. Dari 168 *website* yang dapat diakses saat perhitungan pengungkapan sukarela, penelitian mengeluarkan 2 Pemda yang di dalam *website* resminya tidak terdapat informasi relevan mengenai Pemda tersebut. Dari 166 Pemda, penelitian mengeluarkan 22 provinsi. Dari 144 Pemda, penelitian mengambil 108 Pemda sebagai sampel.

Metode pengujian yang dilakukan adalah, uji beda rata-rata, uji regresi berganda, dan analisis sensitivitas (sebagai pengujian tambahan) sebagai metode untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Model regresi yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

$$\mathbf{PSP}_{a,b,c} = \beta_0 + \beta_1 \text{PAD} + \beta_2 \text{DAU} + \beta_3 \text{UP} + \beta_4 \text{KP} + \beta_5 \text{BD} \quad (3.1)$$

Penjelasan variabel independen dan dependen pada model penelitian dapat dilihat pada dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Variabel dependen diukur dengan menghitung daftar *scoring* indeks pengungkapan sukarela Pemda pada *website* Pemda. Indeks konten merupakan indeks yang mengukur informasi-informasi yang diungkapkan Pemda pada *website* Pemda yang terbagi menjadi 10 sub-indeks. 8 dari 10 sub-indeks (pembangunan, profil daerah, pelayanan daerah, tokoh daerah, pariwisata, kependudukan, dan keuangan) merupakan olahan *item* saja yang paling umum ada pada *website* Pemda; detail informasi kontak dan *timeliness* merupakan sub-indeks olahan dari penelitian Marston & Polei (2004).

Masing-masing sub-indeks konten memiliki sub-sub indeks (lihat 3.4). Indeks presentasi merupakan representasi dari navigasi, *tools* internet, kualitas, dan fitur yang dimiliki oleh *website*. Indeks presentasi terdiri dari dua sub-indeks, yaitu: *tools* presentasi *website* (tabel 3.3.) dan kualitas *website* (tabel 3.2.). *Tools* presentasi merupakan gambaran berbagai macam perangkat internet yang dapat dioperasikan pengelola *website* Pemda sehingga *website* menjadi lebih menarik dan lebih mudah untuk diakses. Daftar sub-indeks *tools* presentasi diolah dari penelitian Xiao et.al. (2004) dan Marston dan Polei (2004). Sub-indeks kualitas *website* menggambarkan kualitas *website* dilihat dari penerapan teknologi dan *users* yang mengakses *website* tersebut. Daftar sub-indeks kualitas *website* diolah dari penelitian Cormie et.al. (2008).

Total presentasi merupakan penjumlahan rata-rata dari indeks pengungkapan konten dan presentasi pengungkapan *website* Pemda.

Pengukuran untuk variabel independen adalah:

$$1. \text{ Rasio PAD} = \text{Total PAD} / \text{Total realisasi anggaran pendapatan} \quad (3.2)$$

$$2. \text{ Rasio ketergantungan (DAU)} = \text{DAU} / \text{Total realisasi anggaran pendapatan} \quad (3.3)$$

$$3. \text{ Ukuran Pemda (UP)} = \text{Log (total aset Pemda)} \quad (3.4)$$

$$4. \text{ Kompleksitas Pemerintahan (KP)} = \text{Log (populasi)} \quad (3.5)$$

$$5. \text{ Belanja Daerah (BD)} = \text{Log (realisasi belanja)} \quad (3.6)$$

4. Hasil Penelitian

4.1. Statistik Deskriptif Sampel

Tabel 4.1 memaparkan statistik deskriptif pengungkapan sukarela untuk *website* Pemda. Sub-indeks yang nilai pengungkapannya diatas 50% adalah profil daerah, kependudukan, perundangan, dan *timeliness* dari pengungkapan konten. Pengungkapan konten pembangunan, pelayanan daerah, tokoh daerah, pariwisata, keuangan, dan detail kontak Pemda belum menjadi prioritas utama Pemda karena nilai pengungkapannya masih berada di bawah 50%.

Untuk sub-indeks pengungkapan konten, ada 8 sub-indeks yang diungkapkan secara penuh oleh Pemda, yaitu sub-indeks: pembangunan, profil daerah, tokoh daerah, pariwisata, kependudukan, keuangan, perundangan, dan *timeliness*. Sebaliknya sub-indeks profil daerah, tokoh daerah, pariwisata, dan keuangan merupakan sub-indeks yang paling sedikit diungkapkan secara penuh dalam *website* Pemda. Sub-indeks pembangunan dan keuangan adalah sub-indeks yang paling banyak tidak diungkapkan Pemda.

Pemda lebih memprioritaskan penyajian *website* yang berkualitas dibandingkan dengan penggunaan fitur dan navigasi *website*. Namun skala prioritas Pemda untuk *tools* presentasi dan

kualitas *website* yang baik tidak terlalu tinggi perbedaannya, dimana *gap* rata-ratanya adalah sebesar 9,83 %. Hal ini sejalan dengan nilai maksimum dan nilai minimum yang dimiliki oleh tiap sub-indeks.

4.2 Uji Beda Rata-Rata

Merujuk pada Tabel 4.2, hasil uji beda rata-rata pada pengungkapan konten menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata untuk pengungkapan rendah dan tinggi berdasarkan variabel PAD, kompleksitas pemerintahan, dan belanja daerah. Pada presentasi pengungkapan, terdapat perbedaan rata-rata untuk pengungkapan rendah dan pengungkapan tinggi berdasarkan variabel ukuran Pemda, kompleksitas pemerintahan, dan belanja daerah. Tidak terdapat perbedaan rata-rata pengungkapan rendah dan tinggi total pengungkapan berdasarkan variabel independen yang diuji.

4.3 Hasil Regresi

Hasil regresi dapat dilihat pada tabel 4.4. Sebelum dilakukan regresi dilakukan pengujian terhadap pemenuhan asumsi klasik, model telah memenuhi asumsi klasik. Nilai F statistik dan $Prob$ (F -statistic) menunjukkan nilai signifikan. Hal ini menunjukkan variabel dependen secara bersama-sama dipengaruhi oleh variabel independen dalam model tersebut.

Nilai *adjusted R²* digunakan untuk melihat seberapa besar variasi dari nilai variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi nilai dari variabel-variabel independennya. Nilai R^2 untuk total pengungkapan: 20,0907%, model pengungkapan konten, 15,6111%, dan presentasi pengungkapan 15,7544%.

Hipotesis 1 ditolak untuk model pengungkapan konten, presentasi pengungkapan, dan total pengungkapan. Merujuk pada hasil uji regresi berganda (Tabel 4.4), dengan tingkat kepercayaan 95%, rasio PAD tidak berpengaruh terhadap pengungkapan konten *website*, presentasi pengungkapan, dan total pengungkapannya karena: nilai Prob. PAD lebih besar dari α (0,3232;

0,4074 ; 0,7982 > 0,05). Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa Pemda yang memiliki kinerja tinggi tidak secara otomatis akan melakukan pengungkapan konten informasi yang tinggi, memiliki presentasi *website* yang juga tinggi, dan tidak secara otomatis akan melakukan pengungkapan rata-rata konten dan presentasi yang tinggi pada *website* Pemda. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Laswad et.al. (2005) yang mendapatkan hasil yang positif dari pengaruh kinerja terhadap *internet financial reporting*. Penggunaan indeks pengungkapan yang lebih luas pada penelitian ini, menjadi penyebab perbedaan hasil penelitian.

Hipotesis 2 diterima untuk model pengungkapan konten dan model total pengungkapan. Rasio ketergantungan daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan konten *website* Pemda dan total pengungkapan *website* Pemda. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa Pemda yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana Pemerintah pusat akan melakukan pengungkapan konten informasi yang tinggi dan memiliki pengungkapan rata-rata konten dan presentasi yang tinggi pada *website* Pemda tersebut. Namun hipotesis 2 ditolak untuk model presentasi pengungkapan. Pemda yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana Pemerintah pusat tidak secara otomatis akan memiliki presentasi *website* yang tinggi. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Robbin dan Austin (1987) pada model pengungkapan konten dan total pengungkapan, dimana ketergantungan Pemda berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan. Hasil yang berbeda dengan penelitian Robbin dan Austin (1987) pada model presentasi pengungkapan dapat terjadi karena pada penelitian Robbin dan Austin (1987), pengungkapan yang diukur adalah pengungkapan keuangan.

Hipotesis 3 diterima untuk model pengungkapan konten, presentasi pengungkapan, dan total pengungkapan. Ukuran Pemdaberperengaruhi positif terhadap pengungkapan konten, presentasi pengungkapan, dan total pengungkapan *website* Pemda. Dapat disimpulkan bahwa Pemda yang memiliki ukuran yang besar akan melakukan pengungkapan konten informasi,

presentasi *website*, dan rata-rata pengungkapan konten dan presentasi yang tinggi dalam *website* Pemda. Hasil penelitian berbeda pada model pengungkapan konten, presentasi pengungkapan, dan total pengungkapan dengan penelitian yang dilakukan et. al. (2005) yang menyimpulkan bahwa ukuran tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan.

Hipotesis 4 diterima untuk model pengungkapan konten. Kompleksitas pemerintahan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan konten *website*. Hal ini menunjukkan daerah yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi akan menyebabkan *willingness* dari Pemda daerah tersebut untuk mengungkapkan informasi lebih banyak kepada masyarakat tersebut juga tinggi. Namun hipotesis 4 ditolak untuk model presentasi pengungkapan dan model total pengungkapan. Kompleksitas pemerintahan tidak berpengaruh positif terhadap tingkat presentasi pengungkapan dan total pengungkapan *website* Pemda. Hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian Robbin dan Austin (1987) pada model presentasi dan total pengungkapan. Namun hasil penelitian berbeda dengan penelitian Robbin dan Austin (1987) pada model pengungkapan konten.

Hipotesis 5 ditolak untuk model pengungkapan konten, presentasi pengungkapan, dan total pengungkapan. Belanja daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan konten, presentasi pengungkapan, dan total pengungkapan *website*. Hasil ini menunjukkan bahwa Pemda yang memiliki belanja yang tinggi tidak secara otomatis akan melakukan pengungkapan konten informasi, memiliki presentasi *website*, dan akan memiliki rata-rata pengungkapan dan presentasi yang tinggi pada *website*. UU No. 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa belanja daerah digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pelayanan yang tinggi tidak secara otomatis akan membuat Pemda untuk mengungkapkan konten informasi dan presentasi *website* yang juga tinggi pada *website* Pemda. Hal ini dapat disebabkan karena adanya kemungkinan bahwa belanja yang tinggi tidak

mencerminkan tingkat pelayanan yang tinggi, sehingga belanja secara otomatis tidak akan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan pada *website* Pemda.

4.4. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas melakukan pengujian tambahan atas model penelitian utama yang diuji. Adapun bentuk dari analisis sensitivitas yang dilakukan adalah dengan metode uji regresi berganda. Pengujian dilakukan dengan mengganti variabel dependen yang diuji dengan sub-indeks dari indeks pengungkapan konten dan presentasi pengungkapan *website* Pemda. Tidak terdapat perubahan pada jumlah sampel dan bobot sub-sub indeks yang digunakan. Hasil dari pengujian terhadap 10 sub-indeks pengungkapan konten dan 2 sub-indeks presentasi dapat dilihat pada tabel 4.6. Hasil pengujian tersebut memberikan hasil yang relatif beragam dan tidak menghasilkan kesimpulan yang konklusif.

5. Kesimpulan, Saran, dan Keterbatasan Penelitian

Pemda mengungkapkan informasi pada *websitenya* pada tingkat 44.84% (total pengungkapan), 47% (pengungkapan konten), dan 42.61%. (presentasi pengungkapan). Pengungkapan dalam *website* Pemda di Indonesia masih tergolong rendah, karena masih berada di bawah level 50%. Informasi yang paling banyak disajikan adalah profil daerah, namun informasi tentang kegiatan pembangunan dan keuangan masih sedikit diungkapkan. Namun, hal ini menandakan Pemda Indonesia dapat digolongkan telah mulai mengadopsi *e-government*.

Variabel yang mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela pada *website* Pemda adalah: ketergantungan daerah (DAU) berpengaruh positif terhadap pengungkapan konten dan presentasi pengungkapan. Ukuran Pemda berpengaruh positif terhadap pengungkapan konten, presentasi pengungkapan, dan total pengungkapan. Kompleksitas pemerintahan berpengaruh positif terhadap presentasi pengungkapan. Kinerja daerah yang digambarkan sebagai rasio PAD dan

Belanja daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan konten, presentasi pengungkapan, dan total pengungkapan untuk *website* Pemda.

Hasil pengujian lebih lanjut di

Data keuangan yang digunakan dalam penelitian ini tidak simultan namun berjaran 2 tahun dari tahun pengamatan. Jumlah sampel yang tidak merepresentasikan Pemda di Indonesia secara keseluruhan karena pembatasan dimasukkannya Pemda yang mendapatkan opini WTP dan WDP dari BPK sebagai sampel untuk laporan keuangan Tahun 2008. Terbatasnya jumlah variabel independen yang diuji pada penelitian menyebabkan variabel dependen yang diuji pada penelitian belum dijelaskan secara luas oleh variabel independennya.

Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan dengan menambah sampel memperluas indeks pengungkapan *website* Pemda, terutama pada konten Pemda dengan menambah item indeks sehingga semakin dapat memperlihatkan ukuran hal-hal yang dapat diungkapkan Pemda pada *website* Pemda. Dapat juga dilakukan analisis dengan memasukkan faktor-faktor lain seperti: kompetisi politik, tingkat adopsi teknologi, jumlah pegawai yang mengurus *website* Pemda, dan *press visibility*. Penelitian berikutnya dapat dilakukan dengan melihat data times series beberapa tahun sehingga dapat dilihat perkembangannya

Daftar Referensi

- Baber, W. R. (1983). Towards understanding of the role of auditing in the public sector. *Journal of Accounting and Economics* 5 (3), 213-227.
- Beattie, V., & Pratt, K. (2001). *Business reporting: Harnessing the power of the internet for users*. Edinburgh: Institute of Chartered Accountants of Scotland.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2009). *Pokok-pokok ikhtisar hasil pemerintahan badan pemeriksa keuangan semester I Tahun 2009*.

- Cormier, D., Ledoux, M. J., & Magnan, M. (2009). The use of websites as a disclosure platform for corporate performance. *International of Accounting Information System Vol 10*, 1-24.
- Christiaens, J., (1999). Financial accounting reform in Flemish municipalities: Anempiricalinvestigation. *Financial Accountability and Management* 15 (1), 21–40.
- Craven, B., Marston, C., (1999).Financial reporting on the internet by leading UK companies.*The European Accounting Review* 8(2), 321-333.
- Debrecny, R., Gray, G. L., & Rahman, A. (2002). The determinants of internet financial reporting. *Journal of Accounting and Public Policy Vol 2*, 371-394.
- Escobar, T., & Bonson, E. (2005). A survey on voluntary disclosure on the internet: Empirical evidence from European Union companies. *The International Journal of Digital Accounting Research Vol 2*, 27-51.
- Ettredge, M., Richardson, V.J., Scholz, S.(2002). Dissemination of information for investors atcorporate websites. *Journal of Accounting and Public Policy* 21 (4/5), 357–369.
- Gujarati, D. N. (2003). *Basic econometrics*. New York: Mc Graw Hill.
- Gupta, B., Gupta, A., & Dasgupta, S. (2008). Adoption of ICT in a government developing country: An empirical study. *Journal of Strategic Information Systems*, 140-154.
- Kaufman, D. K., & Zoido, L. P.(1999).*Governance matters*. Working Paper The World Bank.
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of voluntary internet financial reporting by local government authorities. *Journal of Accounting and Public Policy Vol 24*, 101-121.
- Liestiani, A. (2008). Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia untuk tahun anggaran 2006. *Skripsi Sarjana FEUI* .
- Marston, C., & Polei, A. (2005). Corporate reporting on the internet by German companies. *International Journal of Accounting Information Systems Vol 5*, 285-311.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 3 Tahun 2007. *Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008. *Pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7A Tahun 2007. (2007). *Tatacara penyampaian informasi dan tanggapan atau saran dari masyarakat atas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah*.
- Perez, C. C., Hernandez, A. M., & Bolivar, M. P. (2005). Citizen access to on-line governmental financial information: Practices in the European Union Countries. *Government Information Quarterly Vol 22*, 258-276.

- Reddick, C. G. (2004). A two stage model of e-government growth: Theories and empirical evidence for U.S. cities. *Government Information Quarterly* Vol 21, 51-64.
- Robbins, W. A., & Austin, K. R. (1987). Disclosure quality in governmental financial reports: An assessment of the appropriateness of a compound measure. *Journal of Accounting Research* Vol 24, 412-421.
- Sekaran, U. (2003). *Research method for business: A skill-building approach 4th ed.* John Willey & Sons Inc.
- Standar akuntansi pemerintahan.* (2005). Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- West, D. M. (2005). *Digital government, technology, and public sector performance.* Princeton NJ: Princeton University Press.
- Xiao, J. Z., Yang, H., & Chou, C. W. (2004). The Determinants and Characteristics of Voluntary Internet-based disclosures by listed Chinese Companies. *Journal of Accounting and Public Policy* Vol 23, 191-225.
- Zimmerman, L. J. (1977). The municipal accounting maze: An analysis of political incentives. *Journal of Accounting Research* Vol 15, 107-144.

Tabel 2. 1 Tahap Pertumbuhan *E-government* Berdasarkan Tipe Hubungan Pemerintah

Tipe Hubungan Pemerintah	Tahap Pertumbuhan <i>E-government</i>	
	Tahap 1: <i>Cataloging</i>	Tahap 2: <i>Transaction</i>
G2C	Informasi dan aktivitas Pemerintah yang di- <i>display</i> secara <i>on-line</i> untuk masyarakat	Terdapat <i>database on-line</i> yang dapat mendukung transaksi secara <i>on-line</i> oleh masyarakat
G2G	Informasi dan aktivitas Pemerintah yang di- <i>display</i> secara <i>on-line</i> yang dapat berguna bagi <i>level</i> Pemerintah lainnya beserta aparaturnya	Terdapat <i>database on-line</i> yang dapat mendukung transaksi secara <i>on-line</i> oleh <i>level</i> Pemerintah lainnya beserta aparaturnya
G2B	Informasi <i>on-line</i> yang berguna bagi para pebisnis	Terdapat <i>database on-line</i> yang dapat mendukung transaksi secara <i>on-line</i> oleh pebisnis

(Diolah dari: *A two-stage model of e-government growth: Theories and empirical evidence for U.S. cities*, Reddick, G. Christopher, 2004)

Tabel 2.2 Perbandingan Pelaporan Tradisional dan *On-line*

Faktor Terkait	Pelaporan Tradisional	Pelaporan <i>On-line</i>
Fokus	Politik	Pengguna <i>website</i>
Informasi	Standar	Dapat diukur
Pelaporan	Konstan	Terus-menerus
Kandungan informasi	Informasi keuangan	Aspek informasi yang lebih luas
Perubahan	Tidak ada	Perubahan yang konstan
Format	<i>Hardcopy</i>	Dipublikasikan ke <i>website</i>
Sumber informasi	Informasi yang terkontrol oleh Pemerintah	Informasi dari sumber-sumber <i>users</i> lainnya
Data	Historis	Lebih fokus terhadap masa depan
Cakupan	Nasional	Internasional
Tujuan	Pemenuhan standar	Pemenuhan kebutuhan <i>users</i>

(Diolah dari: *Citizen access to on-line governmental financial information: Practices in the European Union Countries*, Perez, Hernandez, & Bolivar, 2005)

Tabel 2.3 Faktor yang Dapat Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Sukarela

Faktor	Dimensi	Perhitungan
Koalisi voter	Koalisi ekonomi	Pendapatan per kapita
<i>Adm. power</i>	Insentif monitoring	Bentuk Pemda (mayor/manajer)
<i>Management Incentives</i>	Ketertanggung terhadap hutang	Hutang jangka panjang per kapita
	Ketertanggung dana federal	<i>Intergovernmental revenue/total rev.</i>
	Kekayaan Pemda	<i>Own revenue per capita</i>
	Tingkat profesionalitas	Auditor (<i>big eight</i> atau <i>non-big eight</i>)
	Kompleksitas pemerintahan	Populasi daerah

(Diolah dari: *Disclosure Quality in Governmental Financial Reports: An Assessment of the Appropriateness of a Compound Measure*, Robbins, Walter A. Austin, Kenneth, R., 1987)

Tabel 3.1 Penjelasan Variabel Independen dan Dependen

Variabel	Jenis	Kategori	Deskripsi	Exp. Sign
PSP _a	Dependen	-	Pengungkapan konten untuk <i>website</i> Pemda	
PSP _b	Dependen	-	Presentasi pengungkapan untuk <i>website</i> Pemda	
PSP _c	Dependen	-	Pengungkapan total untuk <i>website</i> Pemda	
PAD	Independen	Rasio kinerja	Rasio pendapatan asli daerah per total pendapatan	+
DAU	Independen	Rasio ketergantungan	Rasio dana alokasi umum per total pendapatan	+
UP	Independen	Karakteristik Pemda	Ukuran Pemda	+
KP	Independen	Karakteristik Pemda	Kompleksitas pemerintahan	+
BD	Independen	Karakteristik Pemda	Belanja daerah	+

Catatan:

- PAD terdiri atas: (1) Pajak daerah (2) Retribusi daerah. (3) Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: (4) Lain-lain PAD yang sah (UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 34 Tahun 2000)
- Besarnya DAU yang dialokasikan Pemerintah Pusat diberikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN..

Tabel 3.2. Indeks Presentasi Web

<i>Tools Presentasi*</i>	Skala
<i>Hyperlinks inside the annual report</i>	0/1
<i>Financial data in process able format (such as Excel)</i>	0/1
<i>Annual report in PDF-format</i>	0/1
<i>Annual report in html-format</i>	0/1
<i>Chat room</i>	0/1
<i>Graphic images</i>	0/1
<i>Flashes</i>	0/1
<i>Sound files</i>	0/1
<i>Video files</i>	0/1
<i>Help information</i>	0/1
<i>Table of content/sitemap</i>	0/1
<i>Pull-down menu</i>	0/1
<i>Click-over menu</i>	0/1
<i>Internal search engine</i>	0/1
<i>Next/previous bottoms to navigate sequentially</i>	0/1
<i>Mailing list</i>	0/1
<i>Notice Book</i>	0/1
<i>Contact to the webmaster</i>	0/1
<i>One click to get to press releases or news</i>	0/1
<i>Hits</i>	0/1
<i>User statistics</i>	0/1
Total	21

*Diolah dari Xiao, Yang, & Chou (2004) dan Marston dan Polei (2004)	
Kualitas Web**	Skala
<i>Up-to-date</i>	0/1/2/3
<i>External links (number)</i>	0/1/2/3
<i>Refers to documents for additional information</i>	0/1/2/3
<i>Information usually on the web (versus paper copy)</i>	0/1
<i>User friendly</i>	0/1/2/3
<i>Interactive components</i>	0/1/2/3
<i>Video-audio access</i>	0/1/2/3
Total	7
** Diolah dari Cormier, Ledoux, & Magnan (2008)	

Tabel 3.2. Indeks Konten Pemda

Sub-Indeks:	Skala	Sub-Indeks:	Skala
PEMBANGUNAN		PELAYANAN	
Rencana pembangunan	0/1/2	Pendidikan	0/1/2
Program pembangunan	0/1/2	Kesehatan	0/1/2
Sasaran pembangunan	0/1/2	Olahraga	0/1/2
Indikator pembangunan	0/1/2	Sosial	0/1/2
Strategi pembangunan	0/1/2	Agama	0/1/2
TOTAL	5	Hiburan	0/1/2
		Keuangan	0/1/2
PROFIL DAERAH		Hotel	0/1/2
Lambang dan arti	0/1	Transportasi	0/1/2
Visi dan misi	0/1	Pos	0/1/2
Struktur organisasi	0/1	Telekomunikasi	0/1/2
Sejarah	0/1	TOTAL	11
Geografis	0/1		
Peta	0/1	KEPENDUDUKAN	
Prestasi daerah	0/1	Jumlah penduduk	0/1
Potensi daerah	0/1/2	Kepadatan penduduk	0/1
TOTAL	8	Pertumbuhan penduduk	0/1
		TOTAL	3
TOKOH DAERAH			
Kepala Daerah	0/1/2	KEUANGAN	
Aparatur Daerah	0/1/2	Highlight	0/1
Tokoh Inspirasional	0/1/2	Laporan keuangan	0/1/2
TOTAL	3	APBD	0/1
		TOTAL	3
PERUNDANGAN			
Highlight	0/1	KONTAK DAN INFORMASI LAIN	
Umum	0/1	<i>E-mail address</i>	0/1
Perizinan	0/1	<i>Phone number</i>	0/1
TOTAL	3	<i>Postal address</i>	0/1
		<i>English Web pages</i>	0/1
TIMELINESS*		<i>Discussion Forum</i>	0/1
Berita singkat terbaru	0/1	<i>Pooling</i>	0/1
Tanggal	0/1	<i>Address book</i>	0/1
Kalender kegiatan	0/1	<i>Frequently asked questions</i>	0/1
TOTAL	3	TOTAL	8

Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Variabel Independen

	PAD	DAU	Log(TA)	Log(POP)	Log(EXPD)
Mean	0,07289	0,654285	12,14551	5,648462	11,76896
Median	0,059811	0,676815	12,1156	5,606595	11,77375
Maximum	0,234188	0,926399	12,78235	6,841264	12,24521
Minimum	0,024212	0,375725	11,66993	4,547184	10,56087
Std, Dev,	0,041704	0,100659	0,231069	0,430688	0,205903
Observations	108	108	108	108	108

Catatan:

1. DAU merupakan representasi dari tingkat ketergantungan daerah, TA merupakan total aset dari Pemda yang mengukur ukuran Pemda, POP merupakan jumlah populasi daerah yang mengukur kompleksitas pemerintahan, EXPD merupakan jumlah realisasi belanja Pemda
2. Rata-rata nilai rasio PAD Pemda adalah sebesar 7,29% menunjukkan rata-rata porsi PAD pada pendapatan Pemda masih sangat kecil. Pemda yang memiliki porsi pendapatan sendiri terbesar adalah Kabupaten Cilegon. Pemda yang memiliki porsi pendapatan sendiri terkecil adalah Kabupaten Tanggamus.
3. Rata-rata rasio DAU sebesar 65,42% menandakan porsi DAU dalam total pendapatan Pemda sangat besar, dan juga menandakan ketergantungan Pemda di Indonesia terhadap dana Pemerintah pusat masih sangat tinggi karena nilai rasionya diatas 50%. Pemda yang tingkat ketergantungannya tertinggi adalah Kota Lubuk Linggau, sedangkan daerah yang tingkat ketergantungannya terendah adalah Kabupaten Bekasi.
4. Daerah yang memiliki jumlah aset, atau ukuran terbesar adalah Kabupaten Bogor, sedangkan daerah yang jumlah asetnya terkecil adalah Kota Lhokseumawe.
5. Karena kompleksitas pemerintahan digambarkan dengan banyaknya jumlah penduduk pada daerah tersebut, maka daerah yang paling kompleks pemerintahannya adalah Kabupaten Boyolali, sedangkan daerah yang tingkat kompleksitasnya terendah adalah Kabupaten Way Kanan. Daerah memiliki pengeluaran terbesar adalah Kabupaten Bogor, sedangkan daerah yang memiliki pengeluaran terkecil adalah Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel Independen	Pengungkapan Total		Pengungkapan Konten		Presentasi Pengungkapan	
	<i>Coef.</i>	<i>Prob.</i>	<i>Coef.</i>	<i>Prob.</i>	<i>Coef.</i>	<i>Prob.</i>
PAD	0,078791	0,7982	0,422584	0,3232	-0,264862	0,4074
DAU	0,198345	0,0753**	0,285469	0,0648**	0,111325	0,3326
UP	0,239491	0,0008*	0,209344	0,0322*	0,269634	0,0003*
KD	0,024723	0,5227	0,091358	0,0901**	-0,041916	0,2963
BD	-0,058421	0,4537	-0,161388	0,1367	0,044551	0,581
C	-2,048844	0,0228	-0,907527	0,4615	-3,190211	0,0008
<i>R-squared</i>	0,238247		0,195545		0,196911	
<i>Adj. R-squared</i>	0,200907		0,156111		0,157544	
<i>Prob(F-statistic)</i>	0,000034*		0,000418*		0,000387*	

Catatan:

1. Penjelasan tanda bintang merujuk pada tingkat kepercayaan pengujian, dimana: *Signifikan pada $\alpha 5\%$, **Signifikan pada $\alpha 10\%$
2. Penjelasan variabel independen dapat dilihat pada Tabel 3.1
3. Penjelasan perhitungan variabel independen dapat dilihat pada persamaan matematika (3.2), (3.3), (3.4), (3.5), dan (3.6)

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Pengungkapan Konten dan Presentasi Pengungkapan Website Pemda

	1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*	10*	11*	12*	13*	14*	15*
Mean	38,9815	68,2870	33,16472	39,1981	34,1047	63,5799	28,3945	61,4195	43,1219	60,4939	47,0747	37,6990	47,5314	42,6151	44,8447
Median	20	75	36,36	50	25	100	33,33	66,67	42,86	66,67	48,605	38,1	47,62	42,86	46,66
Maximum	100	100	81,82	100	100	100	100	100	85,71	100	82,71	66,67	95,24	71,43	77,07
Minimum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,83	9,52	14,29	16,67	16,67
Std, Dev,	42,8634	20,1249	20,5194	25,3042	30,0906	45,0080	29,2040	41,3088	23,7584	32,2733	15,1570	11,0319	15,1001	11,4391	11,2838
Obs.	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108

Keterangan:

1 = Pembangunan daerah
 2 = Profil daerah
 3 = Pelayanan daerah
 4 = Tokoh daerah
 5 = Pariwisata
 6 = Kependudukan

7 = Keuangan
 8 = Perundangan
 9 = Kontak
 10 = *Timeliness*
 11 = Total Konten

12 = *Tools* presentasi
 13 = Kualitas *website*
 14 = Total Presentasi
 15 = Total Pengungkapan

*Semua indeks menggunakan satuan persentase (%)

Tabel 4.2 Hasil Uji Beda Rata-Rata

Variabel Independen	Rata-rata Pengungkapan Konten		Sig, t-test	Rata-rata Presentasi Pengungkapan		Sig, t-test	Rata-rata Pengungkapan Total		Sig, t-test
	Rendah	Tinggi		Rendah	Tinggi		Rendah	Tinggi	
PAD	0,111383	0,133750	0,0458*	0,391757	0,410054	0,3783	0,400907	0,405470	0,7664
DAU	0,114119	0,131015	0,1329	0,396165	0,405646	0,6484	0,400902	0,403272	0,8704
UP	0,117400	0,127733	0,3597	0,376320	0,425491	0,0166*	0,400906	0,413196	0,4549
KP	0,112289	0,132844	0,0668**	0,375659	0,426152	0,0138*	0,400907	0,413528	0,4083
BD	0,111911	0,133222	0,0572*	0,381170	0,420641	0,0557**	0,410765	0,400904	0,5905

*Signifikan pada α 5%, **Signifikan pada α 10%

Tabel 4. 5 Hasil Uji Regresi Berganda Sub-Indeks Pelayanan, Pariwisata, *Tools* Presentasi, dan Kualitas *Website*

Variabel Independen	Pelayanan		Pariwisata		<i>Tools</i> presentasi		Kualitas <i>website</i>	
	Koefisien	<i>Prob</i>	Koefisien	<i>Prob</i>	Koefisien	<i>Prob</i>	Koefisien	<i>Prob</i>
PAD	0,298832	0,6145	1,517573	0,0652	-0,54751	0,0853*	0,035429	0,934
DAU	0,248382	0,2451	0,862853	0,0039*	-0,00483	0,966	0,219645	0,1548
UD	0,366924	0,0073*	0,56031	0,003*	0,198147	0,0065*	0,334162	0,0008*
KP	0,080744	0,279	0,149737	0,1456	-0,05559	0,1626	-0,028	0,6019
BD	-0,40599	0,0078*	-0,69769	0,001*	0,129404	0,1073	-0,03894	0,7187
<i>R-squared</i>	0,138832		0,241466		0,154443		0,17276	
<i>Adjusted R-squared</i>	0,096618		0,204283		0,112994		0,132209	
<i>Prob (F-stat)</i>	0,008548*		0,000028*		0,003868*		0,00147*	

Catatan:

1. *Signifikan pada α 5%
2. Penjelasan variabel independen dapat dilihat pada Tabel 3.1
3. Penjelasan perhitungan variabel independen dapat dilihat pada persamaan matematika (3.2), (3.3), (3.4), (3.5), dan (3.6)

Tabel 4.6. Hasil Uji Regresi Berganda Analisis Sensitivitas

Variabel Independen	Pembangunan		Profil_daerah		Pelayanan_daerah	
	Koefisien	Prob	Koefisien	Prob	Koefisien	Prob
PAD	0,363664	0,7791	0,552605	0,359	0,298832	0,6145
DAU	0,767372	0,1015	0,360819	0,097	0,248382	0,2451
UP	0,229354	0,4352	0,181083	0,1853	0,366924	0,0073*
POP	0,136604	0,4015	0,067485	0,3717	0,080744	0,279
BD	-0,16667	0,6111	-0,19648	0,1978	-0,40599	0,0078*
<i>R-squared</i>	0,056907		0,079571		0,138832	
<i>Adjusted R-squared</i>	0,010677		0,034452		0,096618	
<i>Prob (F-stat)</i>	0,300118		0,127028		0,008548*	
Variabel Independen	Tokoh_daerah		Pariwisata		Kependudukan	
	Koefisien	Prob	Koefisien	Prob	Koefisien	Prob
PAD	0,020166	0,9789	1,517573	0,0652*	-0,06813	0,9608
DAU	-0,07328	0,7888	0,862853	0,0039*	0,010594	0,983
UP	0,26471	0,1269	0,56031	0,003*	0,006699	0,9829
POP	0,073159	0,4444	0,149737	0,1456	0,204419	0,2407
BD	-0,18395	0,3403	-0,69769	0,001*	-0,12938	0,7117
<i>R-squared</i>	0,065766		0,241466		0,02407	
<i>Adjusted R-squared</i>	0,01997		0,204283		-0,02377	
<i>Prob (F-stat)</i>	0,2177		0,000028*		0,773263	
Variabel Independen	Timeliness		Tools_p		Kualitas_w	
	Koefisien	Prob	Koefisien	Prob	Koefisien	Prob
PAD	-0,46407	0,6398	-0,54751	0,0853*	0,035429	0,934*
DAU	0,069222	0,8458	-0,00483	0,966	0,219645	0,1548
UP	0,175389	0,4351	0,198147	0,0065*	0,334162	0,0008*
POP	-0,00418	0,9732	-0,05559	0,1626	-0,028	0,6019
BD	0,132251	0,5978	0,129404	0,1073	-0,03894	0,7187
<i>R-squared</i>	0,027323		0,154443		0,17276	
<i>Adjusted R-squared</i>	-0,020357		0,112994		0,132209	
<i>Prob (F-stat)</i>	0,720488		0,003868*		0,00147*	
Variabel Independen	Keuangan		Perundangan		Kontak	
	Koefisien	Prob	Koefisien	Prob	Koefisien	Prob
PAD	1,483939	0,0947	0,408129	0,7383	0,39803	0,5879
DAU	-0,19427	0,54	0,557958	0,2051	0,117161	0,6569
UP	-0,13498	0,4995	0,249556	0,3676	0,080466	0,6284
POP	0,024129	0,8273	0,203465	0,1859	-0,01794	0,8455
BD	0,108123	0,6278	-0,09497	0,7583	0,044194	0,8117
<i>R-squared</i>	0,059685		0,098889		0,015693	
<i>Adjusted R-squared</i>	0,013591		0,054717		-0,032558	
<i>Prob (F-stat)</i>	0,272001		0,056031		0,896749	

(lanjutan)

*Signifikan pada α 5%, **Signifikan pada α 10%